



# RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>i</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Landasan Hukum.....	4
I.3 Maksud dan Tujuan.....	8
I.4 Sistematika Penulisan.....	9
<b>Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu</b> .....	<b>13</b>
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	13
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	34
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	36
II.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	48
<b>Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah</b> .....	<b>49</b>
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	49
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	50
<b>Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah</b> .....	<b>52</b>
IV.1 Program dan Kegiatan.....	52
<b>Bab V Penutup</b> .....	<b>62</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

#### **Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun berjalan, yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### **Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kerja**

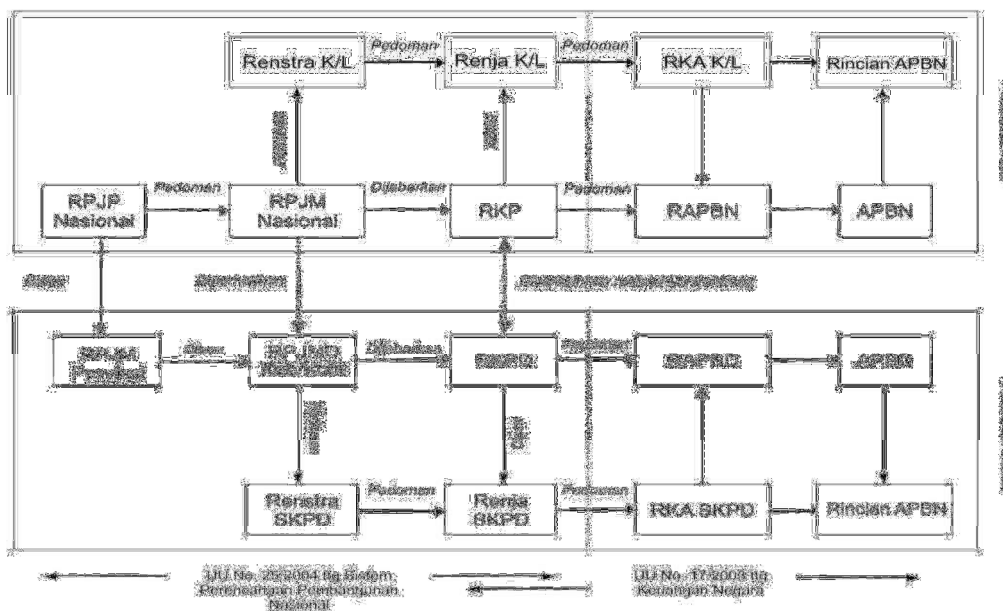
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berpedoman pada Penetapan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2024 merupakan rancangan akhir renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2024 yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2023, tanggal 7 Agustus 2023.



## Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Surabaya periode 2021 – 2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Propinsi Jawa Timur. Pada lingkup pemerintahan, rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1(satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

**Gambar 1.2**  
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



## I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/282/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Koordinator dan Sub Koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;

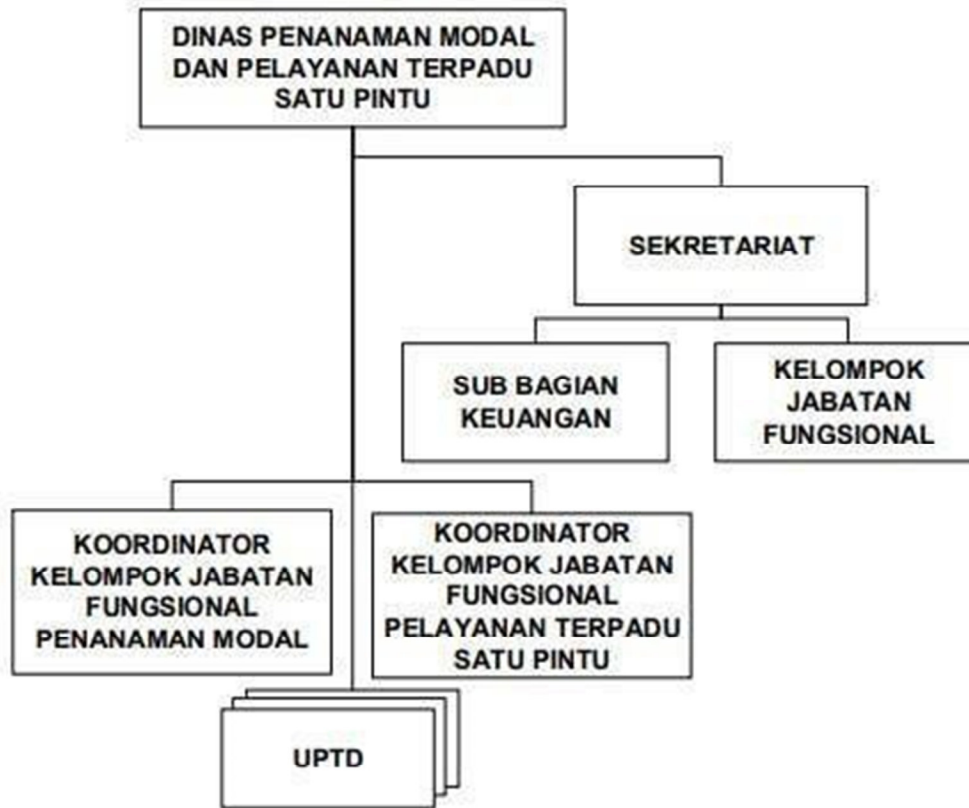
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data/informasi dan realisasi proyek penanaman modal;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi;
- e. pelaksanaan pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi penanaman modal;
- f. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan penyusunan kajian pengembangan potensi penanaman modal,

- termasuk evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal;
- h. pelaksanaan penyediaan peta potensi investasi dan peluang usaha;
  - i. pelaksanaan pemantauan dan pembinaan dalam rangka pengendalian penanaman modal;
  - j. pelaksanaan penyusunan kebijakan pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
  - k. pelaksanaan sosialisasi kebijakan teknis perizina berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
  - l. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
  - m. pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
  - n. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - o. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut disampaikan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gambar 1.3  
Bagan Organisasi Perangkat Daerah



**Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.**

Peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, adalah sebagai berikut:

**Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

**Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan pemerintah bidang penanaman modal merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota disebutkan bahwa urusan penanaman modal urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga urusan penanaman modal tidak memerlukan standart pelayanan minimal.

#### **Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penentuan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan perintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

#### **Ketentuan Indikator Lainnya terkait Perangkat Daerah**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tidak masuk dalam program yang tercantum dalam MDG's.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

#### **Maksud**

Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kota dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah jangka pendek (1 tahun).
- b. Menyelaraskan Rencana Strategis kota dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah.

## Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 1 tahun.
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Perangkat Daerah.

### I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024, sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

Di dalam latar belakang ini dijelaskan mengenai pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat daerah dengan dokumen RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah. serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

##### 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah ini dijelaskan secara ringkas sesuai dengan ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Kewenangan Perangkat Daerah dan ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran, ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Dijelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut.

## BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 dengan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2022.

### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM.

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  
Berisi uraian kinerja, permasalahan, hambatan, dampak pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD  
Berisi proses yang dilakukan perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional  
Bagian ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah  
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

- BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- Bab ini berisikan penjelasan mengenai program dan kegiatan, faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif maupun

kombinasi keduanya.

## BAB V PENUTUP

Dalam penutup Renja ini dijelaskan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun jika terdapat ketidaksesuaian anggaran dengan yang dibutuhkan. Selain itu juga disebutkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rancangan Akhir Renja 2024 serta rencana tindak lanjutnya secara garis besar.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022**

##### **a. Evaluasi Renja Tahun 2022**

Hasil evaluasi Renja Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

##### **1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :**

**Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :**

Tidak ada program yang tidak memenuhi target kinerja

**Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :**

##### **a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran. Dari Target 100% telah terealisasi sebesar 78,37% sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 78,37%.

Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa. Dari Target 100% telah terealisasi sebesar 98,79% sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 98,79%.

##### **2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :**

**Program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :**

Semua program telah melebihi target kinerja yang ditentukan

##### **3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :**

**Program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

**dapat diuraikan sebagai berikut :**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan  
Dari target 89% telah terealisasi 90.25% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 101.41%.
- b. Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator Persentase calon investor/investor yang mempunyai minat berinvestasi  
Dari target 50% telah terealisasi 58.82% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 117,65%.
- c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis  
Dari target 42% telah terealisasi 50,46% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 120,14%.
- d. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal  
Jumlah Investor PMA/PMDN. Dari Target 150 perusahaan telah terealisasi sebesar 151 perusahaan sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 100,67%.
- e. Program Pelayanan Penanaman Modal  
Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal. Dari Target 100% telah terealisasi sebesar 99,35% sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 99,35%.
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal  
Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal. Dari Target 20 lembaga telah terealisasi sebesar 21 lembaga sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 105%.

**Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :**

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi

### Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Calon Investor / Investor yang memperoleh informasi Peluang dan Potensi Investasi. Dari Target 200 calon investor/investor telah terealisasi sebesar 221 calon investor/investor sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 110,50%.

b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Persentase kesesuaian usaha terhadap peta potensi dan peluang usaha. Dari Target 70% telah terealisasi sebesar 72,81% sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 104,01%

c. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan. Dari Target 80000 berkas telah terealisasi sebesar 90564 berkas sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 113,21%.

Jumlah pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi. Dari Target 11000 pelaku usaha telah terealisasi sebesar 11734 pelaku usaha sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 106,67%.

d. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek. Dari Target 1100 perusahaan telah terealisasi sebesar 1111 perusahaan sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 101%.

e. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal. Dari Target 300 perusahaan telah terealisasi sebesar 309 perusahaan sehingga persentase capaian kinerja masih sebesar 103%.

**4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**

- Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dikarenakan realisasi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- Faktor-faktor melebihi target kinerja program/kegiatan dikarenakan adanya jumlah perizinan yang bertambah sehingga banyaknya pemohon yang melakukan perizinan secara online maupun manual seperti :
  1. Sistem online memudahkan masyarakat melakukan pengajuan permohonan perizinan.

**5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

- Meningkatkan nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan
- Meningkatkan pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik dan pertumbuhan ijin realisasi investasi
- Meningkatkan kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana kantor dalam kondisi baik

**6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.**

- a. Meningkatkan kualitas penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan di unit pelayanan dan klinik investasi yang memberikan kenyamanan kepada pelaku usaha.
- b. Peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik.
- c. Penyediaan potensi penanaman modal yang berbasis kawasan /proyek yang menarik minat investor.
- d. Pemberian informasi dan pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha secara intensif dalam pengurusan perizinan dan kewajiban LKPM.
- e. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Penanaman Modal yang menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tindakan pemerintahan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel T-C.29.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap	91%	N/A	89%	90.2558%	101.41 %	90%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		pelayanan kesekretariatan								
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	100 %	100 %	100.00 %	100 %		
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	100 %	100 %	100 %	100.00 %	N/A		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan						27 Orang/bulan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Tunjangan ASN								
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	N/A	100 %	100 %	78.37 %	78.37 %	100 %		
		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	N/A	100 %	100 %	98.79 %	98.79 %	100 %		
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
		Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana perkantoran	N/A	N/A	100 %	78.37 %	78.37 %	N/A		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						12 Laporan		
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	N/A	N/A	100 %	98.79 %	98.79 %	N/A		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>PENANAMAN MODAL</b>									
		<b>Jumlah Investor PMA/PMDN</b>	<b>190Perusahaan</b>	<b>N/A</b>	150Perusahaan	151Perusahaan	100.67 %	<b>170Perusahaan</b>		
<b>2.18.02.2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>									
		Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	N/A	N/A	70 %	72.81 %	104.01 %	72 %		
<b>2.18.02.2.02.02</b>	<b>Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</b>									
		Jumlah Dokumen Peluang dan Potensi Investasi Kota	N/A	N/A	4 Dokumen	5 Dokumen	125.00 %	N/A		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Surabaya								
		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota						4 Dokumen		
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>									
		<b>Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi</b>	<b>55%</b>	<b>N/A</b>	50%	58.8235%	117.65 %	<b>55%</b>		
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>									
		Jumlah Calon Investor /	N/A	N/A	200 Calon Investor /	221 Calon Investor /	110.50 %	250 Calon Investor /		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi			Investor	Investor		Investor		
<b>2.18.03.2.01.02</b>	<b>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</b>									
		Jumlah Promosi Investasi Yang Dilaksanakan	N/A	N/A	3 Pameran	4 Pameran	133.33 %	N/A		
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota						3 Dokumen		
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	N/A	100%	99.3496%	99.35 %	100%		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									
		jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	N/A	N/A	80000 berkas	90564 berkas	113.21 %	N/A		
		Jumlah Pelaku usaha yang ijin usahanya	N/A	N/A	11000 pelaku usaha	11734 pelaku usaha	106.67 %	N/A		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		diawasi								
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
		jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	N/A	N/A	80000 berkas	90564 berkas	113.21 %	N/A		
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan						10000 Pelaku Usaha		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
<b>2.18.04.2.01.02</b>	<b>Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</b>									
		Jumlah Pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	N/A	N/A	11000 Pelaku Usaha	11734 Pelaku Usaha	106.67 %	N/A		
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan						11500 Kegiatan Usaha		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal								
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									
		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan	N/A	N/A	42%	50.4587%	120.14 %	N/A		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		teknis								
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	N/A	N/A	1100 perusahaan	1111 perusahaan	101.00 %	1.200 perusahaan		
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal	N/A	N/A			0.00 %	N/A		
<b>2.18.05.2.01.02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>									
		Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi	N/A	N/A	258 peserta	327 peserta	126.74 %	N/A		
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal						260 Pelaku Usaha		
<b>2.18.05.2.01.</b>	<b>Koordinasi dan</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
03	Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal									
		Jumlah Pengawasan ke lokasi proyek penanaman modal (DAK)	N/A	N/A	170 proyek	170 proyek	100.00 %	N/A		
		Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan penanaman modal (APBD)	N/A	N/A	2700 perusahaan	2706 perusahaan	100.22 %	N/A		
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan						2870 Kegiatan Usaha		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL									
		jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20lembaga	N/A	20lembaga	21lembaga	105.00 %	20lembaga		
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	N/A	N/A	300 perusahaan	309 perusahaan	103.00 %	350 perusahaan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
		Jumlah data investasi yang dikelola	N/A	45621 data	46054 data	46167 data	100.25 %	N/A		
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji						4 Dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dan Dimanfaatkan								

## **II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang dapat kita gambarkan kinerjanya adalah terkait Indikator Kinerja Kunci sedangkan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan pemerintah bidang penanaman modal tidak termasuk urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga tidak memerlukan standard pelayanan minimal, hal tersebut tertuang didalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas :

- i. Pendidikan;
- ii. Kesehatan;
- iii. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- iv. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- v. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- vi. Sosial.

Bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tidak memiliki Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

## **II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

### **Permasalahan dalam pelaksanaan tugas fungsi dan pelayanan yang bersumberdari internal**

- a. Keterbatasan sumber daya manusia terutama pada pelayanan perizinan dan pengawasan penanaman modal sehubungan beban kerja kewenangan DPMPTSP sesuai Perwali 41 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan non berusaha dan Pelayanan non perizinan, hambatan tersebut berdasarkan rumusan dari program pelayanan penanaman modal.
- b. Kendala pada sistem elektronik berupa jaringan trouble atau perbaikan sistem yang menghambat pelaksanaan pelayanan publik, hambatan tersebut berdasarkan rumusan dari program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Sarana dan prasarana pendukung informasi teknologi untuk pelayanan perizinan yang sudah lewat masa manfaat dan tidak optimal, hambatan tersebut berdasarkan rumusan dari program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

### **Hambatan bersumber dari eksternal**

- a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha di Daerah yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian Peraturan Daerah dan Sistem Elektronik Perijinan melalui OSS RBA, hambatan tersebut berdasarkan rumusan dari program pelayanan penanaman modal.
- b. Belum optimalnya sistem Perijinan Berusaha Berbasis Resiko sehingga menyebabkan kendala dalam proses pengurusan perijinan berusaha di daerah, hambatan tersebut berdasarkan rumusan dari program pelayanan penanaman modal.
- c. Kurang tepatnya waktu dari pelaku usaha/penanam modal dalam memberikan data kegiatan yang dilakukan terkait kegiatan investasi. , hambatan tersebut berdasarkan rumusan dari program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

- d. Masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti mengenai kewajiban penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), hambatan tersebut berdasarkan rumusan dari program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

#### **II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD yaitu proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dari hasil review yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa ada perubahan nama kegiatan, indikator kegiatan dan perubahan anggaran (kenaikan/penurunan pagu indikatif). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.31.

Tabel 2.3  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
(Tabel T-C.31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91 %	<b>13,475,558,261</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91 %	<b>13,076,477,583</b>	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	<b>9,912,796,682</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	<b>9,526,850,124</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	9,912,796,682	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	9,526,850,124	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Pintu					Pintu				
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100 %	<b>3,562,761,579</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100 %	<b>3,549,627,459</b>	
			Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100 %				Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100 %		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	179,401,070	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	179,401,070	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	3,383,360,509	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Penanaman Modal dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	3,370,226,389	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Umum Kantor yang Disediakan				Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Umum Kantor yang Disediakan			
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		Jumlah Investor PMA/PMD N	190 Perusahaan	<b>690,983,398</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		Jumlah Investor PMA/PMD N	190 Perusahaan	<b>609,002,361</b>	
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	74 %	<b>690,983,398</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	74 %	<b>609,002,361</b>	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4 Dokumen	690,983,398	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	609,002,361	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	55 %	<b>790,759,514</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	55 %	<b>765,417,014</b>	
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a</b>		Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	250 Calon Investor / Investor	<b>790,759,514</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot a</b>		Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	250 Calon Investor / Investor	<b>765,417,014</b>	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kot a	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	790,759,514	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kot a	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	765,417,014	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
		Pintu					Pintu				
4	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100 %	<b>3,635,035,418</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100 %	<b>3,597,469,538</b>	
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	90.000 berkas	<b>3,635,035,418</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan	90.000 berkas	<b>3,597,469,538</b>	
			Jumlah kegiatan usaha yang ijin	11.500 Kegiatan usaha				Jumlah kegiatan usaha yang ijin	11.500 Kegiatan usaha		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			usahanya dilakukan pemantauan					usahanya dilakukan pemantauan			
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	11.500 Kegiatan Usaha	939,809,224	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	11.500 Kegiatan Usaha	908,609,224	
	Penyediaan Pelayanan	Dinas Penanaman	Jumlah Pelaku	12.000 Pelaku	2,695,226,194	Penyediaan Pelayanan	Dinas Penanaman	Jumlah Pelaku	12.000 Pelaku	2,688,860,314	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	man Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Usaha		Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	man Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Usaha		
5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang	44 %	<b>1,073,593,906</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang	44 %	<b>1,061,317,443</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			mengikuti bimbingan teknis					mengikuti bimbingan teknis			
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1.300 perusahaan	<b>1,073,593,906</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1.300 perusahaan	<b>1,061,317,443</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisa	2900 Kegiatan Usaha	754,311,028	Pengawasan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil	2900 Kegiatan Usaha	743,334,565	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			si Pengawasan					dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	270 Pelaku Usaha	319,282,878	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis	270 Pelaku Usaha	317,982,878	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
								Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga	<b>211,826,175</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>		jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga	<b>214,326,175</b>	
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	400 perusahaan	<b>211,826,175</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	400 perusahaan	<b>214,326,175</b>	
	Pengolahan, Penyajian dan	Dinas Penana	Jumlah Data dan	4 Dokume	211,826,175	Pengolahan, Penyajian dan	Dinas Penana	Jumlah Data dan	4 Dokume	214,326,175	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
	Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	man Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	n		Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	man Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	n			
<b>TOTAL</b>					<b>19,877,756,672</b>	<b>TOTAL</b>					<b>19,324,010,114</b>	

## II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa terhadap rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tahun 2024 telah diadakan Forum Perangkat Daerah dengan mengundang stakeholder terkait yang diselenggarakan, pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 23 Februari 2023  
Pukul : 09.00 – Selesai  
Tempat : Gedung Siola Lantai 2, Ruang Rapat 203.  
Jalan Tunjungan No. 1 – 3 Surabaya

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023, maka para peserta Forum Perangkat Daerah menyepakati :

1. Program dan kegiatan prioritas serta indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Kota.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Tahun 2024 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan.

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun Program dan sub Kegiatan Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya Pada Rencana Kerja Tahun 2024 pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Strategi Nasional dengan Tugas dan Fungsi PD**

Strategi yang dilakukan Kementerian Investasi	Strategi PD	Bidang pada PD
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (investor needs)</li> <li>• Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing</li> <li>• Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal</li> <li>• Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal</li> <li>• Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal</li> <li>• Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal</li> <li>• Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Surabaya</li> <li>• Pemutakhiran Peta Potensi Investasi sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah</li> <li>• Perencanaan Berbasis Kinerja disertai output dan outcome yang jelas</li> <li>• Menciptakan Inovasi dalam rangka pengembangan Sistem Elektronik Perizinan</li> <li>• Memastikan terlaksananya pelayanan publik yang transparan dan menjamin kepastian hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat</li> <li>• Koordinator Penanaman Modal</li> <li>• Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong peningkatan penanaman modal dibidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja</li> <li>• Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal</li> <li>• Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi</li> <li>• Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar</li> <li>• Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor</li> <li>• Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar</li> <li>• Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri</li> </ul>		
--	--	--

### III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya mendukung Misi Walikota sebagai berikut :

#### **Misi**

- a. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan

jasa antar pulau serta internasional

- b. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya yaitu:

- a. Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan dengan indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah dan Target 6,30%
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan public yang efektif dan inovatif dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Target 90,16%

Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya yaitu:

- a. Meningkatnya Jumlah Investor PMA/PMDN dengan indikator Nilai Investasi Daerah dan Target 50,5 Triliyun Rupiah.
- b. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Nilai SAKIP dan Target 87,39.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Pelayanan Penanaman Modal dan Target 94%.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### IV.1. Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

**a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan mengacu pada :**

- Visi dan Misi yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022-2026 Kota Surabaya.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Strategis Pembangunan Kota Surabaya yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2022 - 2026,

Dari 5 Misi pembangunan Kota Surabaya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menjalankan Misi 1 dan 4 dengan tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

**- Misi 1**

Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional

**Tujuan :**

Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan

**Sasaran :**

Meningkatnya Jumlah Investor PMA/PMDN

**- Misi 4**

Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

**Tujuan :**

Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

**Sasaran :**

- Mengelola sarana dan prasarana perangkat daerah
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik

**b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya pada Tahun 2024 menjalankan mandat 6 Program dan 10 sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 19.324.010.114, adapun program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.076.477.583,- Indikator Program Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan dengan output 91% tersebut diatas didukung oleh 3 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN target output 27 orang.
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indicator Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan dan perlengkapan kantor yang disediakan target output 12 laporan.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indicator jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan target output 12 laporan.

**2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 609.002.361,- Indikator Program Jumlah Investor PMA/PMDN dengan target output 190 perusahaan tersebut diatas didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dengan indicator Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten/kota target output 4 dokumen.

**3. Program Promosi Penanaman Modal**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 765.417.014,- Indicator Program persentase calon investor/investor yang mempunyai minat berinvestasi dengan target output 55% tersebut diatas didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota target output 3 dokumen.

**4. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.597.469.538,- indicator Program ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal

dengan target output 100% tersebut diatas didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan indikator jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik target output 12.000 pelaku usaha.
- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dengan indikator jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal target output 11.500 kegiatan usaha.

**5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.061.317.443,- indicator Program persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis dengan target output 44% tersebut diatas didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indicator jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal target output 270 pelaku usaha.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan target output 2900 kegiatan usaha.

**6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 214.326.175,- indicator Program jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal dengan target output 20 lembaga tersebut diatas didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan indikator Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan target output 4 dokumen.

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.**

Pada Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 sesuai dengan Rancangan Awal RKPD baik jenis program maupun kegiatannya.

Adapun rencana Program dan kegiatan beserta tolak ukur kinerja dan pagu indikatif dapat diuraikan sebagai berikut secara detail pada tabel dibawah ini.

Tabel T-C.33  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024  
dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Surabaya

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan		91 %	Rp 13.076.477.583			92 %	Rp 15.437.187.863
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	Rp 9.526.850.124			100 %	Rp 13.215.149.327
2.18.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		27 Orang/bulan	Rp 9.526.850.124			27 Orang/bulan	Rp 13.215.149.327

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100 %	Rp 3.549.627.459			100 %	Rp 2.222.038.536
			Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100 %				100 %	
2.18.01.2.08.003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 179.401.070			12 Laporan	Rp 180.186.668
2.18.01.2.08.004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 3.370.226.389			12 Laporan	Rp 2.041.851.868
2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA/PMDN	190 Perusahaan	Rp 609.002.361			210 Perusahaan	Rp 635.019.971
2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	74 %	Rp 609.002.361			76 %	Rp 635.019.971
2.18.02.2.02.004		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Rp 609.002.361			4 Dokumen	Rp 635.019.971
2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	55 %	Rp 765.417.014			60 %	Rp 694.510.379
2.18.03.2.01		Penyelenggaraan	Jumlah Calon Investor /	250 Calon	Rp 765.417.014			300 Calo	Rp 694.510.379

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi		Investor / Investor				n Investor / Investor	
2.18.03.2.01.002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		3 Dokumen	Rp 765.417.014			3 Dokumen	Rp 694.510.379
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal		100 %	<b>Rp 3.597.469.538</b>			100 %	<b>Rp 5.363.410.534</b>
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah berkas Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan yang telah diterbitkan		90.000 berkas	<b>Rp 3.597.469.538</b>			95.000 berkas	<b>Rp 5.363.410.534</b>
		Jumlah kegiatan usaha yang ijin usahanya dilakukan pemantauan		11.500 Kegiatan usaha				12.000 Kegiatan usaha	
2.18.04.2.01.006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		12.000 Pelaku Usaha	Rp 2.688.860.314			12.000 Pelaku Usaha	Rp 4.323.479.781

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
			Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2.18.04.2.01.008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		11.500 Kegiatan Usaha		Rp 908.609.224			11.500 Kegiatan Usaha	Rp 1.039.930.753
2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis		44 %		Rp 1.061.317.443			45 %	Rp 1.005.605.182
2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek		1.300 per usahaan		Rp 1.061.317.443			1.400 per usahaan	Rp 1.005.605.182
2.18.05.2.01.005		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		270 Pelaku Usaha		Rp 317.982.878			270 Pelaku Usaha	Rp 271.867.020

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.05.2.01.006		Pengawasan Penanaman Modal		2900 Kegiatan Usaha	Rp 743.334.565			2900 Kegiatan Usaha	Rp 733.738.162
2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	Rp 214.326.175			20 lembaga	Rp 380.289.449
2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	Rp 214.326.175			450 perusahaan	Rp 380.289.449
2.18.06.2.01.002		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Rp 214.326.175			4 Dokumen	Rp 380.289.449

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terintegrasi secara Elektronik								
<b>TOTAL</b>					Rp 19.324.010.11 4				Rp 23.516.023.378

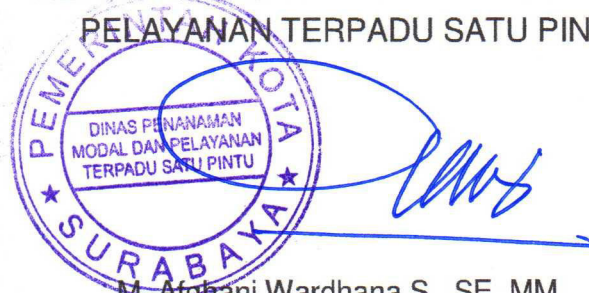
\*Kebutuhan dana/pagu indikatif dalam prakiraan maju rencana th. 2025 mempertimbangkan prediksi inflasi dan prediksi kenaikan UMK.

## BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RKPD tahun 2023. Dokumen Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja berdasarkan Perwali tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2023.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 9 Agustus 2023  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



M. Afghani Wardhana S., SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009